



Judul	: Kebijakan Pembangunan Pemuda: Strategi dan Tantangannya
Penulis	: Muhammad Lukman Hakim dan Indah Dwi Qurbani
Penerbit	: Media Nusa Creative
Tebal	: xii + 134 hlm; 15,5 x 23 cm
Tahun Terbit	: 2021
ISBN	: 978-602-462-600-6

MEMBANGUN KEBIJAKAN PRO-PEMUDA

Arrial Thoriq Setyo Rifano
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
arelsr@gmail.com

Telah banyak literatur yang membahas peran pemuda dalam aspek sosial dan pembangunan, namun terdapat kesenjangan penelitian terkait kebijakan pemerintah terhadap pemuda. Tidak dapat dihindari besarnya peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan atas pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh pemuda. Mengisi *research gap* tersebut, suami-istri Dr. Muhammad Lukman Hakim, SIP. M.Si dan Dr. Indah Dwi Qurbani, SH. MH. melalui buku terbarunya *Kebijakan Pembangunan Pemuda: Strategi dan Tantangannya* (2021) melaksanakan penelitian terkait topik tersebut.

Buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu Bab 1 Pemuda: Siapa dan Bagaimana; Bab 2 Membangun Pemuda, Membangun Negara; Bab 3 Pembangunan Pemuda di Daerah; Bab 4 Pemetaan Masalah dan Strategi Peningkatan; Bab 5 Menggagas Kota Layak Pemuda; dan Bab 6 Penutup.

Pemuda merupakan klasifikasi sosial yang cair. Beberapa lembaga memiliki kategori umur yang berbeda merujuk kepada siapa pemuda itu. Pemuda sendiri memiliki peran historis yang panjang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Saat ini, pemuda mengisi komposisi yang besar dalam demografi Indonesia. Hal ini dapat menjadi keuntungan, bahwa terdapat kelimpahan umur produktif, namun juga dapat berubah menjadi kerugian. Kerugian dapat terjadinya ledakan pengangguran dan penyebaran radikalisme yang menasar pemuda. Diperlukan kebijakan yang dapat melibatkan kembali pemuda dalam pembangunan.

Strategi yang mampu dimanfaatkan untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan adalah pemberdayaan. Terdapat beberapa pendekatan tentang pemberdayaan pemuda, salah satunya

adalah pendekatan pemberdayaan pemuda secara kritis (*critical youth empowerment/CYE*) yang dikembangkan oleh Jennings *et. al.* CYE berfokus pada proses emansipatoris yang dapat menimbulkan tindakan masyarakat dan upaya keadilan sosial. Sementara itu, sebagai bentuk tindak lanjut upaya pembangunan pemuda, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengembangkan kerangka kerja sebagai acuan informasi mengenai kondisi pembangunan pemuda di seluruh Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Berfokus pada dua daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu provinsi yang memiliki nilai capaian IPP dengan selisih yang cukup jauh dari provinsi lainnya, dilakukan penelitian yang diharapkan mampu menggambarkan kondisi perkembangan kepemudaan yang ada, baik faktor penghambat maupun potensi yang dapat dioptimalkan. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Malang yang memiliki kuantitas penduduk berusia muda yang cukup tinggi. IPP Kabupaten Lamongan lebih tinggi dari IPP Provinsi dan IPP Nasional, sedangkan IPP Kabupaten Malang lebih rendah dan memiliki selisih cukup jauh dengan IPP Provinsi dan IPP Nasional. Pada Kedua daerah tersebut, domain gender dan diskriminasi serta domain lapangan dan

kesempatan kerja menjadi dua domain dengan capaian terendah.

Pendekatan CYE digunakan untuk mengetahui dimensi keberhasilan sekaligus menguraikan persoalan pembangunan pemuda pada kedua daerah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Kabupaten Lamongan, telah diinisiasi beberapa program pengembangan pemuda, namun terdapat kendala berupa minimnya dukungan masyarakat secara luas. Di Kabupaten Malang sendiri, tingginya kriminalitas, khususnya pencurian dan peredaran narkoba, serta lemahnya pendataan dan koordinasi antar lembaga menjadi permasalahan dalam pembangunan pemuda. Lebih luas, di kedua daerah, pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan dan anak (baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual) menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Perlu pengawalan dari pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam beberapa inovasi sebagaimana disarankan oleh penulis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperlukan *political will* dari pemerintah daerah yang lain untuk mentransformasi daerahnya sebagai kota layak pemuda (KLP). KLP memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Perlu upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat

semaksimal mungkin bagi pembangunan, salah satunya dengan cara membentuk peraturan daerah tentang kepemudaan.

Berdasarkan studi kasus pada dua daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan pemuda yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kondisi kepemudaan harus berorientasi pada domain-domain lemah dari capaian IPP daerah masing-masing. Strategi tersebut dapat diterjemahkan dengan memperkuat basis pendidikan kalangan pemuda, mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi pemuda, dan memastikan peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan.

Buku ini secara sistematis telah memberikan pandangan baru bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkait kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam rangka pembangunan pemuda. Sebagaimana telah disampaikan oleh penulis, kendala selama penelitian, berupa keterbatasan dan kebaruan data, telah ditanggulangi dengan penyesuaian baik secara prosedural maupun statistik. Berkaitan dengan aspek fisik, terdapat beberapa kesalahan pengetikan yang tidak mengganggu pembaca dalam memahami substansi buku dan dapat diperbaiki dalam cetakan-cetakan berikutnya. *Last but not least*, selain bermanfaat dibaca oleh pemerintah sebagai sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan kedepannya, buku ini juga sangat berguna dibaca oleh

kalangan pemuda, khususnya mahasiswa, sebagai agen kritis perubahan bangsa.